

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring perkembangan Akuntansi Sektor Publik di Indonesia, maka kebutuhan akuntabilitas sebagai wujud pertanggungjawaban kepada masyarakat atas kinerja pemerintah menjadi suatu tuntutan yang umum. Menguatnya tuntutan tersebut mengharuskan lembaga pemerintah memberikan informasi atas aktivitas dan kinerja kepada publik. Lembaga pemerintah diberi kewenangan untuk penyelenggaraan pengelolaan keuangan sehingga lembaga pemerintah diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, dan transparan.

Suatu pemerintah yang baik setidaknya ditandai dengan tiga elemen yaitu transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Partisipasi maksudnya mengikut sertakan keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang tidak menyalurkan aspirasinya. Sedangkan akuntabilitas adalah pertanggungjawaban kepada pihak atas setiap aktivitas yang dilakukan.

Salah satu faktor terkait kualitas laporan keuangan adalah kepatuhan dan pemahaman terhadap penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Adanya keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang memahami mekanisme penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan menjadi kendala dalam mewujudkan LKPD yang berkualitas.

Penyusunan laporan keuangan yang berpedoman pada standar akuntansi pemerintah sesungguhnya dapat digunakan sebagai salah satu cara untuk mewujudkan *good governance*. Alasannya adalah terpenuhinya tiga elemen *good*

governance yaitu akuntabilitas, transparan dan partisipasi. Pertama, akuntabilitas karena dengan adanya standar, pengungkapan efektivitas dan efisiensi APBN/ABD menjadi bersifat kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan. Kedua, transparansi karena dengan adanya standar, BPK menjadi mudah menyingkap tempat-tempat yang memiliki celah untuk melakukan korupsi karena telah mempunyai basis yang baku, mantap dan komprehensif dalam tugas pemeriksaan keuangan dan audit atas laporan keuangan. Ketiga, partisipasi karena adanya standar rakyat pada tiap daerah melalui DPRD makin mampu mengendalikan keuangan daerahnya karena pemerintah tidak bisa mencatat pemakaian sumber daya sesuai keinginannya.

Pemahaman SAP akan berdampak pada peningkatan kualitas pelaporan keuangan di pemerintah pusat, daerah maupun desa. Ini berarti informasi keuangan pemerintah menjadi dasar pengambilan keputusan di pemerintahan. Dalam PP No. 71 Tahun 2010 disebutkan bahwa SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang harus diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan. Hal ini bertujuan agar dalam penyusunan laporan keuangan tidak menyalahi aturan yang telah ditetapkan dan laporan keuangan yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan. Komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan berbasis akrual terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran dan laporan finansial, yang diuraikan sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
3. Neraca
4. Laporan Operasional (LO)
5. Laporan Arus Kas (LAK)
6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
7. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)

Selain pemahaman terhadap SAP, faktor lain yang perlu diperhatikan adalah pendidikan terhadap perangkat yang ada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Pendidikan yang dimaksud adalah latar belakang pendidikan. Dengan memperhatikan pendidikan dari perangkat SKPD, maka berhubungan dengan tingkat

pemahaman terhadap SAP sehingga akan membantu dalam penyusunan laporan keuangan daerah.¹ Pendidikan seseorang dapat berpengaruh terhadap perilaku dan cara berpikir seseorang dalam menghadapi suatu persoalan yang ia hadapi. Seseorang yang berpendidikan umumnya bersikap berdasarkan keilmuan yang ia miliki dan apa yang ia ketahui. Dalam penyusunan laporan keuangan latar belakang pendidikan merupakan faktor yang bisa mempengaruhi kreatifitas seseorang dalam hal pengambilan keputusan. Maka dari itu penyusun laporan keuangan hendaknya memiliki pendidikan yang sesuai dengan pekerjaannya, sehingga dapat mendukung kinerjanya di dalam penyusunan laporan keuangan yang dalam hal ini adalah latar belakang pendidikan akuntansi.

Hal lain yang tidak kalah penting adalah pelatihan, mengingat bahwa melalui pelatihan mampu memberikan tambahan kemampuan dalam menghadapi perubahan maupun penyesuaian system kerja di masa mendatang. Pelatihan diarahkan pada peningkatan kompetensi yang dibutuhkan. Pengembangan pendidikan dapat diwujudkan dalam bentuk pelatihan untuk mempermudah pegawai dalam mengerjakan pekerjaan dan tanggung jawab yang diberikan. Ketidapkahaman aparatur pemerintah daerah tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah menjadikan pelatihan sebagai upaya untuk mengatasi kesulitan dalam menyusun laporan keuangan.

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara merupakan instansi dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang berkedudukan sebagai koordinator pengelolaan lingkungan hidup di Provinsi Sumatera Utara. Secara garis besar, fungsi startegis yang diemban adalah untuk memfasilitasi pembangunan berkelanjutan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

¹ Tiara Merdianti, *Pengaruh Latar Belakang Pendidikan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan Sebagai Variabel Intervening* (Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama, 2017), h. 3.

Fenomena pelaporan keuangan pemerintah daerah merupakan sesuatu hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut. Kenyataannya didalam laporan keuangan pemerintah daerah masih ada yang belum disajikan data yang tidak sesuai dengan PP No. 71 Tahun 2010. Sebagaimana yang telah dituturkan oleh bapak Irham Dani Tanjung salah satu staff keuangan di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara, bahwa laporan keuangan yang disajikan oleh Dinas Lingkungan Hidup yaitu: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.² Dan yang belum disajikan yaitu, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Dan Laporan Arus Kas. Untuk itu penelitian ini bertujuan untuk melihat kualitas laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah daerah, sudahkah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah sebagaimana yang tercantum dalam PP 71 tahun 2010.

Untuk menindak lanjuti hal tersebut, maka perlu mengkaji secara mendalam tentang tinggi rendahnya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah saat ini. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul” Analisis Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera utara”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis mengidentifikasi masalah didalam penelitian ini adalah :

1. Adanya ketidak lengkapan pada penyajian laporan keuangan pemerintah pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara.
2. Adanya ketidakpastian di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara tentang kualitas laporan keuangan yang sesuai dengan PP No. 71 Tahun 2010.

² Irham Dani Tanjung, *Hasil wawancara dengan bagian keuangan*, (dinas lingkungan hidup, 5 Desember 2019)

C. Batasan Masalah

Tujuan pembatasan masalah ini adalah agar ruang lingkup peneliti tidak luas dan lebih fokus untuk menghindari kesalahan sehingga tidak menyimpang dari pokok permasalahan serta mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Peneliti membatasi penelitian ini mengenai penerapan Standar Akuntansi Pemerintah PP No. 71 Tahun 2010.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara?
2. Apakah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara sudah menyajikan laporan keuangan sesuai PP No. 71 tahun 2010 dengan efektif dan efisien?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan dari hasil penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui Kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup Sumatera Utara.
2. Untuk mengetahui apakah Dinas Lingkungan Hidup Sumatera Utara sudah menyajikan laporan keuangan sesuai dengan PP No. 71 Tahun 2010 dengan efektif dan efisien.

b. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain :

1. Bagi Peneliti

Diharapkan melalui penelitian ini agar dapat menambah dan memperdalam wawasan pengetahuan tentang pengaruh Pemahaman SAP, pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah dan kompetensi sumberdaya manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pemerintah Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup Sumatera Utara.

2. Bagi Pemerintah Daerah

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi masukan yang positif dan juga perbandingan bagi pihak Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara yang berguna sebagai evaluasi bagi Pemerintahan terutama berkenaan bagi penerapan pencatatan akuntansi keuangan yang sesuai dengan SAP PP No. 71 Tahun 2010.

3. Bagi Akademisi

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah kepustakaan di bidang ilmu pengetahuan dan dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya.

